



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RUSZAENI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **832471**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.700.000.000

1. Tanah Seluas 806 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/250 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
6. Tanah Seluas 147 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000
8. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
9. Tanah Seluas 65 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 526.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI		
Rp. 17.500.000		
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI		
Rp. 25.000.000		
4. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1997, HASIL SENDIRI	Rp.	
70.000.000		
5. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	
406.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	22.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.248.000.000
III. HUTANG	Rp.	685.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.563.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.